

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

## Proyek Kantor Kecamatan Terhambat Kasus Lahan

Pemerintah DKI kembali kalah dalam perkara gugatan aset.

### Gangsa Parikesit

gangsa@tempo.co.id

JAKARTA Pemerintah Kota Jakarta Selatan tidak bisa membangun kantor Kecamatan Mampang Prapatan senilai Rp 19,5 miliar tahun ini lantaran lahananya masih dalam sengketa. Menurut Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matai, sangat risiko jika pemerintah kota nekat membangun kantor di Jalan Bangka II, Peja Mampang, tersebut.

"Kami enggak berani (membangun) karena sekarang proses hukumnya masih berjalan," katanya kepada *Tempo*, kemarin.

Marullah mengungkapkan, pemerintah kota perlu membangun kantor Kecamatan Mampang Prapatan di lokasi baru karena kantor saat ini di Jalan Mampang Prapatan XL, Tegal Parang, korop kebanjiran. Pelayanan pun bakal tengganggu. Sedangkan lahan baru di Jalan Bangka II merupakan milik pemerintah DKI, tapi tengah digugat oleh Cut Mardiana dan T. Karya Muda yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 2.550 meter persegi tersebut.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengaku pernyataan anggaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Hingga Selasa lalu, penyerapan anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan serta rumah dinas lurah/camat di Jakarta Selatan, baru mencapai 0,5% persen dari pagu anggaran Rp 34,44 miliar.

"Saya sangat menyesalkan kinerja teman-teman. Mereka yang mengusulkan kegiatannya, anggarannya minta sekitar, kok tidak dikerjakan," ujar Saefullah seusai rapat membahas serapan anggaran di Balai Kota Selasa lalu.

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Fadjar, menuturkan DKI telah mengantongi sertifikat hak pakai Nomor 124/Pdt tanggal 4 September 1984, dengan luas lahan 2.340 m<sup>2</sup>. Keabsahan sertifikat juga tak diragukan karena Mahkamah Agung pada 5 Desember 2017 menolak kasasi yang diajukan penggugat Cut Mardiana dan T. Karya Muda.

Fadjar menerangkan, Mardiana dan Karya pernah mengajukan gugatan atas sertifikat hak pakai yang dimiliki pemerintah DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 5 Agustus 2016. Namun, dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, pemerintah selalu menang. Keduanya lalu mengajukan gugatan perdana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 September 2017. Tapi, pada 13 September 2018, pengadilan mengabulkan gugatan itu.

Dia berjanji atas putusan itu lantaran pengadilan hanya melihat para penggugat mengacai fisik lahan di Jalan Bangka II tersebut selama 20 tahun. Padahal DKI memiliki sertifikat hak pakai sejak 1984. "Masak, sertifikat kalah hanya karena penguasaan fisik" DKI pun mengajukan banding.

Fadjar menuturkan, Biro

Hukum sudah menyarankan agar pemerintah kota dan Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta segera menguasai tanah itu sejak adanya putusan kecas Mahkamah Agung. Namun saran itu tak kunjung dilanjutkan.

Kasus hukum Cut Mardiana dan T. Karya Muda, Darmi Marasubessy, belum bisa memperoleh pernyataan atas sengketa itu. "Saya lagi nyetir," tuturnya melalui pesan elektronik.

• LINI DUNIA

KLAN

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Proyek Kantor Kecamatan Terhambat Kasus Lahan

### Karena Perencanaan Tak Matang

**W**ali Kota Jakarta Selatan Marullah Matallak menuturkan hanya mampu merealisasikan program rehabilitasi total rumah dinas Lurah Kalibata, Camat Cilancak, dan Camat Pesanggrahan. Sedangkan proyek kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Karct, dan renovasi kantor Kelurahan Kuningan Timur terpaksa tak bisa digarap tahun ini.

Menurut Marullah, sangat risiko jika memaksakan kehendak. "Perencanaannya anggarannya perlu lebih matang lagi," tuturnya, kemarin.

Berikut ini rencana pembangunan kantor lurah dan camat di Jakarta Selatan pada APBD DKI 2018:

Nomor	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kalibata	Rp 1,2 miliar	Bisa terrealisasai
2	Pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan	Rp 2 miliar	Bisa terrealisasai
3	Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan	Rp 3,5 miliar	Gagal
4	Pembangunan Kantor Lurah Karct	Rp 6,9 miliar	Gagal
5	Rehab Total Rumah Dinas Camat Cilandak	Rp 1,2 miliar	Bisa terrealisasai
6	Renovasi Bangunan Kelurahan Kuningan Timur	Rp 3,2 miliar	Gagal

• BANGSA PAKIKITI PELBAGI SUMBER